



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam dalam mengajak manusia untuk beriman dalam mengamalkan ‘akidahnya dan mempercayai ajarannya, tidaklah hendak mempergunakan jalan kekerasan dan paksaan, karena sifat keimanan itu sendiri bertentangan dengan kekerasan dan paksaan, dalam bentuk manapun. Sebenarnya keimanan itu hendaklah tumbuh dengan wajar dalam jiwa.¹

Semua agama yang dibawa oleh para Nabi dan Rasulnya sama. Kesamaan dalam arti asal risalahnya adalah satu.² Manusia pertama diciptakan Allah adalah Nabi Adam As. Sebagai *abu al-basyar* dengan Siti Hawa sebagai *ummu al-basyar*. Kemudian keturunan Nabi Adam itu sebagai umat yang satu (*ummatun wahidah*). Seperti yang terkandung di dalam ayat Al-Qur’an Q.S. al-Baqarah ayat 213, bahwa manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka selisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan

¹ Syeikh Mahmud Shalut, *Akidah dan Syariah Islam I*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1994), 7.

² Abdul Raup Silahudin, *Membela Islam*, (Bandung : MQ Publishing, 2006), 54.



kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri.³

Lebih jauh, din telah dijadikan bahan perdebatan dan sulit dipahami dalam perpecahan dari internal.⁴

Pengertian agama dalam masyarakat Indonesia selain dari kata agama, dikenal pula kata din dari bahasa Arab dan kata *religi* dari bahasa Eropa. Agama berasal dari kata Sanskrit. Selanjutnya, Din dalam bahasa Semit berarti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, kebiasaan.⁵

Islam adalah ajaran pembebasan manusia dari segala belenggu yang mengungkung dirinya hingga menjadi manusia merdeka. Islam adalah '*tahrir al-nas min 'ibadati al-'ibad ila ibadati allah*': membebaskan manusia dari penyembahan kepada sesama manusia dengan hanya menyembah Allah saja.⁶

Sedang pengertian Islam secara istilah atau secara khusus bahwa Islam merupakan agama yang diterima Nabi Muhammad Saw. Lewat wahyu yang

³Said Agil Husin Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Jakarta : Ciputat Press, 2005), 1.

⁴ Aflatun Muchtar, *Tunduk Kepada Allah*, (Jakarta : Khazanah Baru, 2001), 11.

⁵ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta : UI-Press, 1985), 9.

⁶ Abdul Raup Silahudin, *Membela Islam*, (Bandung : MQ Publishing, 2006), 64.



pertama kali diterima di Gua Hira,⁷ yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad Saw, sebagai rasul.⁸

Makna Islam demikian itu memiliki perbedaan yang luar biasa dengan nama agama lainnya. Kata Islam tidak mempunyai hubungan dengan orang tertentu atau dari golongan manusia atau dari suatu negeri. Kata Islam adalah agama yang diberikan oleh Tuhan sendiri.⁹

Agama Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Termasuk Indonesia. Pada akhir abad ke-12, di pantai timur Sumatra terdapat negara Islam bernama Perlak. Pendirinya adalah orang Arab keturunan suku Quraisy. Pedagang Arab itu kawin dengan putri pribumi, keturunan raja perlak. Dari perkawinan itu, ia mendapat seorang putra bernama Sayid Abdul Aziz. Setelah ditabalkan menjadi sultan Perlak, bernama Alaidin Syah. Agama Islam yang dipeluk oleh sultan Alaidin Syah ialah agama Islam aliran Syi'ah.¹⁰ Dan di sanalah negara Islam pertama kali berdiri di nusantara.

Pengertian negara secara literal istilah merupakan terjemahan dari kata asing, yakni *state* (bahasa Inggris), *staat* (bahasa Belanda dan Jerman) dan *etat* (bahasa Prancis). Kata *Staat*, *state*, *etat* itu diambil dari kata bahasa Latin *status* atau *statum*, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang

⁷ *Ibid.*, 139.

⁸ Harun Nasution, *Islam Ditinjau*, 24.

⁹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006), 65.

¹⁰ Slamet Muljana, *Hindu-Jawa-Islam Nusantara*, (Yogyakarta : LKiS, 2007), 130.



memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Kata status atau *statum* lazim diartikan sebagai *standing* atau *station* (kedudukan).¹¹

Pengertian negara secara terminologi, negara diartikan dengan organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat,¹² yang bercita-cita menegakkan hak dan keadilan bagi segenap rakyat, serta berusaha untuk memudahkan jalan mencari penghidupan dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian.¹³

Islam datang memperbaiki akidah dengan memastikan ke-Esa-an Allah dalam arti seluas kata, dan memperbaiki kerusakan masyarakat dengan menghapus segala bentuk perbedaan derajat manusia; maka atas dasar dan tujuan inilah, Islam membangun Daulah atau negara.¹⁴

Islam memberikan pandangan dunia dan makna hidup bagi manusia termasuk bidang politik. Dari sudut pandang ini maka pada dasarnya dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama (din) dan politik (dawlah). Argumentasi ini sering dikaitkan dengan posisi Nabi Muhammad ketika berada di Madinah yang

¹¹ Dede Rosyada *et al*, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media, 2000), 41.

¹² *Ibid.*, 42.

¹³ Mushthafa As Siba 'ie, *Agama dan Negara Study Perbandingan Antara Yahudi-Kristen-Islam*, (Surabaya : Asia Afrika, 1978), 4.

¹⁴ A. Hasjmy, *Di mana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1984), 50.



membangun sistem pemerintahan dalam sebuah negara kota (*city-state*). Di Madinah Rasulullah berperan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala agama.¹⁵

Tujuan utama dari sebuah pemerintahan Islam adalah untuk membentuk sebuah masyarakat Islam. Oleh karena itu, sebuah masyarakat Islam, secara definitif adalah sebuah masyarakat yang ideal di mana tertib sosial telah dibentuk dan diatur sesuai dengan nilai-nilai Islam, ajaran-ajaran, dan aturan-aturannya.¹⁶ Berbagai definisi kepemimpinan dalam Islam : Kata imam lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa kepada kebaikan. Adapun kata-kata *Imamah* dita'rifkan oleh al-Mawardi dengan: “*Imamah* adalah suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.”¹⁷

Yusuf Musa mensitir pendapat Ibnu Khaldun tentang definisi khilafah yang disamakan dengan *Imamah* yaitu: “Al-Khilafah membawa/memimpin masyarakat sesuai dengan kehendak agama dalam memenuhi kemaslahatan akhiratnya dan dunianya yang kembali kepada keakhiratan itu; karena hal ihwal keduniaan kembali seluruhnya menurut Allah untuk kemaslahatan akhirat. Maka

¹⁵ Dede Rosyada *et al*, *Pendidikan Kewargaan*, 61.

¹⁶ Ahmad Vaezi, *Agama Politik*, diterjemahkan oleh Ali Syahab, (Jakarta : Citra, 2006), 10

¹⁷ H.A. Dzjazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), 87.



kekhilafahan itu adalah kekhilafahan dari pemilik syara' di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.”¹⁸

Sedang kata amir tidak ditemukan di dalam al-Qur'an meskipun kata amara banyak disebutkan dalam al-Qur'an. Yang mengarah kepada pemimpin adalah kata ulil amri. Seperti yang dijelaskan di dalam surah al-Nisa 59, bahwa “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-nya, dan ulil amri, diantara kamu.”

Pengertian taati ulil amri adalah para penguasa ahli-ahli hukum, para ulama, panglima-panglima militer, para pemimpin, dan para *zu'ama*. Mereka inilah yang membawa manusia kepada ketentuan-ketentuan yang dibawa oleh Rasul, dalam seluruh kehidupan untuk kebaikan yang menyeluruh.¹⁹

Dari akar di atas, pada satu dasawarsa 1920-1930, menurut Taufik Abdullah merupakan “dasawarsa ideologi” dalam sejarah modern Indonesia. Di masa ini pulalah berbagai jenis ideologi, yang kemudian akan berpengaruh dalam pertumbuhan keagamaan dan dasar ideologi perjuangan.²⁰ Gagasan Soekarno, bahwa agama dapat dan harus dipisahkan dari negara dan pemerintahan, sebab agama merupakan aturan-aturan spiritual (akhirat dan negara adalah masalah

¹⁸ *Ibid.*, 88.

¹⁹ Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1995), 92.

²⁰ Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam*, (Jakarta : Teraju, 2002), 49.



duniawi (sekular).²¹ Sedangkan menurut Natsir sangat meyakini kebenaran Islam sebagai suatu ideologi kenegaraan.²²

Kemudian partai Masyumi didirikan sebagai hasil dari kongres umat Islam tanggal 7-8 November 1945 di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan secara aklamasi disetujui menjadi satu-satunya partai politik Islam yang mewadahi semua aspirasi politik dan cita-cita umat Islam.²³ Tetapi dalam susunan anggota DPR-GR tidak tampak adanya wakil-wakil Masyumi, partai politik Islam terbesar, karena Masyumi telah dibubarkan oleh Soekarno dengan surat keputusan presiden No. 200 tahun 1960 tertanggal 17 Agustus 1960.²⁴

Pada tanggal 24 Februari 1966 KAMI melakukan demonstrasi ke Istana Negara, di saat Soekarno melakukan pelantikan Kabinet 100 menteri.²⁵ Menyusul Kudeta PKI, Soekarno pada gilirannya diturunkan dari kekuasaan, yang merupakan strategis bagi munculnya pemerintahan Orde Baru di Indonesia tahun 1966.²⁶

²¹ *Ibid.*, 80.

²² *Ibid.*, 112.

²³ Faizai Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama*, (Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya, 1999), 59.

²⁴ Abdul Qadir Djaelani, *Peran Ulama dan Santri*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1994), 121.

²⁵ *Ibid.*, 126.

²⁶ Faizai Ismail, *Ideologi Hegemoni*, 98.



Mengkaji hubungan agama dan negara di Indonesia, secara umum dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) bagian, yakni hubungan yang bersifat antagonistik dan hubungan yang bersifat akomodatif. Hubungan antagonistik merupakan sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antara negara dengan Islam sebagai sebuah agama. Sedangkan paham akomodatif lebih dipahami sebagai sifat hubungan dimana negara dan agama satu sama lain saling mengisi bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik.²⁷

Sedang relasi Islam menurut pandangan aktivis Islam seperti kata Idham Chalid ditentukannya tentang konsep Syura dan demokrasi terpimpin, yang menurutnya ada dua hal.

Pertama, ketika dia menyatakan bahwa musyawarah (syura) adalah bukti adanya demokrasi dalam Islam atau dengan kata lain syura adalah demokrasi dalam Islam. Kedua, ketika Idham menyamakan beberapa hal dalam syura dengan demokrasi terpimpin.²⁸ Seperti halnya Kiai Idham Chalid yang telah memberikan sumbangsih berupa pemikiran, Kiai Ahmad Siddiq juga telah banyak berpikir mengenai suatu pembaharuan di dalam tubuh NU.²⁹

K.H. Achmad Siddiq, yang mempunyai nama kecil Achmad Muhammad Hasan, lahir di Jember pada hari Ahad legi, 24 Januari 1926 (10 Rajab 1344),

²⁷ Dede Rosyada *et al*, *Pendidikan Kewargaan*, 64.

²⁸ Ahmad Muhajir, *Idham Chalid Guru Politik Orang NU*, (Yogyakarta : LKiS, 2007), 120.

²⁹ Greg Barton, *Gus Dur The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, diterjemahkan oleh Lie Hua, (Yogyakarta : LKiS, 2002), 153.



atau tujuh hari sebelum kelahiran Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan meninggal dunia pada hari Rabu, 23 Januari 1991 (7 Rajab 1411) di Surabaya. Achmad Siddiq adalah putra bungsu Kiai Muhammad Siddiq dari isteri keduanya, Nyai Hj. Zakiah (Nyai Maryam binti K.H. Yusuf. Ketika berusia dua tahun, ia sudah ditinggal ibunya yang wafat di Laut Merah dalam perjalanan pulang haji dari tanah suci, Makkah. Tujuh tahun kemudian, ayahnya tutup usia ketika Achmad Siddiq belum genap berusia sepuluh tahun. Sejak itu, kakaknya, Mahfudz Siddiq mendapat tugas untuk membesarkan Achmad Siddiq.³⁰

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Konsep Islam dan Negara
- b. Islam dan Pancasila Menurut K.H. Achmad Siddiq
- c. Islam dan Pelaksanaan Tri Ukhuwwah
- d. Ahlusunnah Wal Jama'ah dengan Politik Kenegaraan
- e. Relasi Islam dan Ke-Indonesia-an Menurut K.H Achmad Siddiq
- f. Peran Islam dalam Politik Kenegaraan

³⁰ *Ibid.*, 15.



2. Batasan Masalah

Penulis tidaklah mudah untuk meneliti semua permasalahan dengan bidang yang diteliti, oleh karena itu peneliti akan membatasi masalah yang terkait dengan penelitian adalah:

- a. Konsep Islam dan Negara
- b. Islam dan Pancasila Menurut K.H. Achmad Siddiq
- c. Relasi Islam dan Ke-Indonesia-an Menurut K.H Achmad Siddiq

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Relasi Islam dan Negara menurut pemikiran K.H. Achmad Siddiq dalam konteks *Ahlusunnah Wal Jamaah*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Relasi Islam dan Negara menurut pemikiran K.H. Achmad Siddiq dalam konteks *Ahlusunnah wal jamaah*

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini sekurang-kurangnya diharapkan dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritisnya sebagai berikut :



- a. Menambah wawasan dan referensi bagi *civitas academika* dan aktivis muslim Indonesia terkait pemikiran K.H. Achmad Siddiq terkait relasi Islam dan Negara.
 - b. Memberikan Informasi dan referensi dalam menentukan kebijakan dalam relasi Islam dan kenegaraan di Indonesia.
2. Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah :

Memberikan informasi politik bagi kebijakan publik Indonesia terkait perjuangan para ulama seperti, K.H. Achmad Siddiq dalam menentukan arah perjuangan Islam di Indonesia dalam konteks *Ahlussunnah Wal Jamaah*.

F. Definisi Operasional

Untuk memahami penelitian ini, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud yang terkandung, maka penulis menguraikan tentang definisi operasional sebagaimana berikut ini :

1. Relasi : hubungan antara yang satu dengan yang lainnya.
2. Islam : agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad Saw., sebagai rasul. Islam pada hakekatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai



berbagai segi dari kehidupan manusia, yakni syariah dalam konsteks hukum al-Qur'an dan al-Hadist, atau fikih.³¹

3. Negara : Organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sovereign (kedaulatan).³²
4. Relasi Islam dan Negara : wilayah agama dan negara tidak dapat dipisahkan (*integrated*); wilayah agama juga meliputi wilayah politik atau negara. Oleh karena itu, menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pandangan inilah yang disebut dengan fundamentalisme Islam.³³ Kedua, hubungan agama dan negara bersifat simbiotik, yaitu berhubungan secara timbal balik dan

³¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau*, 24.

³² Budiyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, (Jakarta : Erlangga), 2.

³³ Ali Maschan Moesam, *Nasionalisme Kiai Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, (Yogyakarta : LKiS, 2007), 24.



saling memerlukan. Dalam hal ini, negara membutuhkan agama sebagai dasar-pijakan kekuatan moral sehingga ia dapat menjadi mekanisme kontrol; sementara di sisi lain agama memerlukan negara sebagai sarana untuk pengembangan agama itu sendiri.³⁴ Ketiga, agama dan negara bersifat sekularistik. Pandangan ini menolak hubungan agama yang bersifat simbiotik maupun *integrated*. Abd ar-Raziq berpendapat bahwa tugas Nabi Muhammad tidak lebih sekadar mengemban tugas kenabian (*innaha nubuwwah la mulk*) sebagaimana nabinabi sebelumnya. Urusan duniawi oleh Nabi Muhammad diserahkan kepada umat manusia, termasuk di dalamnya urusan politik.³⁵

³⁴ *Ibid.*, 25.

³⁵ *Ibid.*, 26.



G. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka dimaksudkan untuk mengkaji hasil penelitian yang relevan dengan penelitian peneliti. Sejauh penelusuran yang peneliti lakukan, peneliti menemukan satu penelitian yang variabelnya hampir sama dengan peneliti-peneliti. Berikut kami paparkan hasil verifikasi penelitian sebelumnya.

1. Ali Anshor (Skripsi).³⁶ Dengan judul: “*Pemikiran K.H. Achmad Siddiq Tentang Pancasila Sebagai Asas Tunggal Tahun 1983.*” Pada penelitian ini yang menjadi fokus untuk diteliti oleh penulis ialah pencarian asas ideologi di kalangan Nasionalis Islam. Dalam penelitiannya disimpulkan tentang konsep Islam dan Pancasila menurut para tokoh Islam yang bermula ketika hasrat Soeharto dan kroninya menuju deidologisasi, dan inisiatif untuk memasukkan Pancasila sebagai asas tunggal ke dalam Undang-Undang.
2. Peneliti yang dilakukan oleh Rudy Al Hana (Artikel).³⁷ Dengan Judul : “*Pemikiran K.H. Achmad Siddiq Tentang Ukhuwah Islamiyah, Wathaniyah, Dan Basyariyah.*” Pada penelitian ini yang menjadi pembahasan memang tentang pemikiran K.H. Achmad Siddiq tentang Tri Ukhuwwahnya dan Biografinya. Akan tetapi peneliti belum sepenuhnya membahas pokok-

³⁶ Ali Anshor, *Pemikiran K.H. Achmad Siddiq Tentang Pancasila Sebagai Asas Tunggal Tahun 1983*, (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, 2004) 24.

³⁷ Rudy Al Hana, “Pemikiran K.H. Achmad Siddiq Tentang Ukhuwah Islamiyah, Wathaniyah, Basyariyah”, *Study Islam*, vol IV (Agustus, 2004), 1.



pokok karya dan pemikiran K.H. Siddiq yang lainnya. Seperti, hubungan Islam dan Negara, Khittah Nadliyyah, Hubungan Islam dan Pancasila, dll.

Dalam penelitian ini penulis mengambil tema yang lebih spesifik tentang Relasi Islam dan Negara menurut pemikiran K.H. Achmad Siddiq. Yang menjadi pembeda antara peneliti sebelumnya adalah (a) pencarian asas ideologi di kalangan nasionalis Islam, (b) K.H. Achmad Siddiq tentang Tri Ukhuwwahnya dan Biografinya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*Library Research*) di mana penulis mengkaji data yang berasal dari buku-buku dan artikel, jurnal dan hasil wawancara deskriptif dalam memperkuat data yang ada di buku-buku dan karya tulis lain.

Penelitian ini menggunakan alat analisis deskriptif analitis. Penulis menjabarkan data tertulis dengan menganalisis relevansinya dengan kehidupan politik kenegaraan di Indonesia.

1. Data Yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini, data yang dihimpun ialah data yang berkaitan dengan penelitian ini, meliputi :

1. Data yang berkaitan dengan Relasi Islam dan Negara



2. Data yang berkaitan dengan Islam dan Nasionalisme
3. Data yang berkaitan dengan Aswaja dalam konteks Islam, Politik Di Indonesia

2. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian dari penelitian yang akan menentukan keotentikan penelitian, berkenaan dengan itu pada penelitian ini sumber data dihimpun dari :

- a. Data primer, yaitu :
 1. K.H. Achmad Siddiq, *Aqidah, Syari'ah, dan Tasawuf*, ed Choirul Anam, Jakarta : PT Duta Aksara Mulia, 1992
 2. K.H. Achmad Siddiq, *Khittah NU 1926*, ed Choirul Anam, Jakarta : PT Duta Aksara Mulia, 1992
 3. K.H. Achmad Siddiq, *Hubungan Agama dan Pancasila*, ed Choirul Anam, Jakarta : PT Duta Aksara Mulia, 1992
 4. K.H. Achmad Siddiq, *Negara Kesatuan RI Bentuk Final*, ed Choirul Anam, Jakarta : PT Duta Aksara Mulia, 1992
 5. K.H. Achmad Siddiq, *Watak Sosial Ahlusunnah*, ed Choirul Anam, Jakarta : PT Duta Aksara Mulia, 1992
 6. K.H. Achmad Siddiq, *The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq; Membedakan Tasawuf*, ed Syamsun Ni'am, Surabaya : Erlangga, tt



7. K.H. Achmad Siddiq, *Ahlusunnah Wal Jama'ah*, ed Samsul Munir Amin, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2009
 8. K.H. Achmad Siddiq, *Pedoman Berpikir Nahdlatul Ulama*, Surabaya : FOSNU JATIM, tt
 9. K.H. Achmad Siddiq, *Khitthah Nahdliyyah*, Perwajahan ed Cholil Mustamid, Surabaya : Khalista, 2005
 10. K.H. Achmad Siddiq, *Wawancara Dengan Rais Aam PBNU*, Jakarta : Lajnah Ta'lif Wa Nasyar PBNU, 1985
 11. K.H. Achmad Siddiq, *Pemikiran K.H. Achmad Siddiq Tentang Ukhuwah Islamiyah, Wathaniyah, Basyariyah*, ed Rudy Al Hana, Surabaya : Kopertais IAIN Sunan Ampel, 2004
- b. Data sekunder, yaitu :
1. A. Hasjmy, *Di mana Letaknya Negara Islam*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1984
 2. Ahmad Vaezi, *Agama Politik*, diterjemahkan oleh Ali Syahab, Jakarta : Citra, 2006
 3. Ahmad Muhajir, *Idham Chalid Guru Politik Orang NU*, Yogyakarta : LKiS, 2007
 4. Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, Yogyakarta : LKiS, 2007
 5. Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam*, Jakarta : Teraju, 2002



6. Abdul Qadir Djaelani, *Peran Ulama dan Santri*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1994
7. Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1995
8. Budiyanto, *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*, Jakarta : Erlangga, 2000
9. Dede Rosyada, dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media, 2000
10. Dhurorudin Mashad, *Akar Konflik Politik Islam Di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008
11. Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, Yogyakarta : LKiS, 2003
12. Faizai Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama*, Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya, 1999
13. Greg Barton dan Greg Fealy *Traditionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dkk, Yogyakarta : LKiS, 1997
14. Greg Barton, *Gus Dur The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, diterjemahkan oleh Lie Hua, Yogyakarta : LKiS, 2002
15. H.A. Dzjazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta : Prenada Media, 2003



16. Hendarmin Ranadireksa, *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung : Fokusmedia, 2007
17. J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1994
18. Khalid Ibrahim lindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1995
19. K.H. Achmad Siddiq, *Pemikiran K.H. Achmad Siddiq Tentang Pancasila Sebagai Asas Tunggal Tahun 1983*, editor Ali Anshor, Skripsi, IAIN Sunan Ampel, 2004
20. M. Mansyur Amin, *Dinamika Islam Sejarah Transformasi dan Kebangkitan*, Yogyakarta : LKPSM, 1995
21. M. Umer Chapra, *Peradaban Muslim Penyebab Keruntuhan & Perlunya Reformasi*, diterjemahkan oleh Ikhwan A. Basri, Jakarta : Amzah, 2010
22. Said Agil Husin Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, Jakarta : Ciputat Press, 2005
23. Sjechul Hadi Poermono, *Islam dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan Teori dan Praktek*, Surabaya : Cv. Aulia, 2004
24. Sudirman Teba, *Islam Pasca Orde Baru*, Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya, 2001



3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian pustaka (*library research*) yaitu meneliti terhadap sumber-sumber pustaka yang dipandang relevan dengan penelitian ini. Sehingga teknik penelitian data dalam penelitian ini menggunakan metode dekomentor yang sumber datanya terdiri dari data-data primer dan sekunder yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk buku, maupun hasil wawancara yang representative dan relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Seluruh data yang terkumpul akan dianalisis secara bertahap, yakni dengan tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh secara cermat baik itu data primer maupun data sekunder, tentang Relasi Islam dan Negara Menurut Pemikiran K.H. Achmad Siddiq dalam konteks *Ahlusunnah Wal Jamaah*.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun secara sistematis data tentang Relasi Islam dan Negara Menurut Pemikiran K.H. Achmad Siddiq dalam konteks *Ahlusunnah Wal Jamaah*.



- c. *Analyzing*, yaitu tahapan analisis terhadap data yang telah melalui dua tahap di atas dan selanjutnya diambil kesimpulan terhadap data di atas.

5. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data, peneliti menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun tulisan dengan sedemikian rupa. Sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah. Sehingga langkah yang ditempuh peneliti selanjutnya ialah mendeskripsikan gagasan Relasi Islam dan Negara yang dikeluarkan oleh K.H. Achmad Siddiq.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini ialah menggunakan metode deduktif. Yaitu, data yang diperoleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan dengan mengemukakan gambaran umum tentang relasi Islam dan Negara Menurut Pemikiran K.H. Achmad Siddiq. Selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan



Sistematika pembahasan dalam penelitian skripsi ini, dibagi menjadi lima bab. Yang masing-masing bab terbagi atas sub-sub bab. Pembagian masing-masing bab menjadi sub-sub bab dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam mempelajari skripsi ini. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

- Bab I : Dalam bab ini berisi tentang pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Dalam bab ini berisi teori umum tentang relasi Islam dan Negara yang meliputi : pengertian Islam dan Negara, Konsep Islam dan Negara, Pandangan Islam dan Negara, Partai Islam dan Negara di Indonesia yang kaitannya dengan relasi Islam dan Negara, dan relasi Islam dan Negara menurut pandangan aktifis politik Islam.
- Bab III : Dalam bab ini berisi biografi K.H. Achmad Siddiq, karya-karya K.H. Achmad Siddiq, Pandangan K.H. Achmad Siddiq tentang relasi Islam dan Pancasila, Islam dan NKRI, *Ukhuwah* dan Nasionalisme, *Ahlusunnah Wal Jama'ah* dalam politik di Indonesia, Etika politik *Ahlusunnah Wal Jama'ah* dalam kehidupan bangsa.
- Bab VI : Berisi tentang analisis relasi Islam dan Negara menurut pemikiran K.H. Achmad Siddiq.



Bab V : Memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.